

POLITIK HUKUM PERKOPERASIAN DI INDONESIA

(Studi Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 28/PUU-XI/2013

Tentang Dibatalkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2012

Tentang Perkoperasian)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum (S.H.) dan Hukum Islam
(S.H.I.)**

Oleh:

YAYANG RAGIL PRAMBUDI

NIM 135010112111002/10220103



**PROGRAM DUA GELAR KESARJANAAN
ANTARA
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
DENGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK
IBRAHIM
FAKULTAS SYARIAH
2015**

ABSTRAK

Yayang Ragil Prambudi NIM 135010112111002/10220103, **POLITIK HUKUM PERKOPERASIAN DI INDONESIA** (Studi Yuridis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 Tentang Dibatalkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian) Skripsi, Program Dua Gelar Kesarjanaan Antara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dengan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing UIN Maliki Malang: Dr. H. Mujaid Kumkelo, M.H

Pembimbing Univ. Brawijaya: Dr. Sihabudin, S.H., M.H.

Kata Kunci : Politik Hukum, Pengujian Undang-Undang, Koperasi

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan konstitusi untuk menguji peraturan perundang-undangan terhadap UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “*judicial review*”. Atas kewenangan itu, MK berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan Nomor 89/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam buku registrasi Nomor 28/PUU-XI/2013. Menilai bahwa UU No. 17 Tahun 2012 bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari hasil pengujian tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan membatalkan UU No. 17 Tahun 2012 dan memberlakukan sementara waktu UU perkoperasian yang sebelumnya yakni UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Berdasarkan problem hukum diatas, maka rumusan masalah yang dirumuskan sebagai berikut: 1) Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 28/PUU-XI/2013 membatalkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian? 2) Bagaimana politik hukum putusan MK No. 28/PUU-XI/2013 tentang pemberlakuan sementara UU No. 25 Tahun 1992?. Dari rumusan masalah tersebut maka, penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Dan analisa hukum yang digunakan adalah metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah undang-undang yang terkait dengan perkoperasian serta putusan MK No. 28/PUU-XI/2013 atau sering disebut penelitian kepustakaan (*Library Reseach*)

Hasil dari penelitian untuk rumusan masalah yang pertama adalah sbb: Terdapat tiga faktor yang melatarbelakangi Mahkamah Konstitusi Membatalkan UU No. 17 Tahun 2012 yakni: 1) Faktor filosofis, Nilai UU tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian sebagai usaha bersama dan berdasarkan asas kekeluargaan. 2) Faktor Yuridis, UU No. 17 Tahun 2012 dalam kenyataannya tidak memuat amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1). 3) Faktor Sosiologis, UU. No 17 Tahun 2012 mengenyampingkan modal sosial yang menjadi ciri utama fundamental koperasi. Adapun rumusan masalah yang kedua, terkait dengan politik hukum Putusan MK No. 28/PUU-XI/2013 yang memberlakukan kembali UU No. 25 Tahun 1992 untuk sementara waktu 1992 dalam kenyataannya tidak meyelesaikan problem hukum perkoperasian saat ini. Banyak pengaturan baru dalam UU No. 17 Tahun 2012 yang tidak tertuang dalam UU No. 25 Tahun 1992 dan sebaliknya apa yang telah diatur dalam UU No. 17 Tahun 2012 dalam kenyataannya tidak sesuai dengan amanat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1).

A. Latar Belakang

Koperasi merupakan suatu organisasi yang sudah memiliki sejarah panjang. Dalam perjalanan sejarahnya, hakekat dan definisi perkoperasian sudah dibakukan ditingkat internasional, sehingga seluruh dunia pada hakekatnya memiliki prinsip – prinsip yang sama. Konsep ideal perkoperasian yang konsisten dengan cita-cita dan gerakan koperasi yang bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah menempatkan watak atau karakteristik koperasi Indonesia sebagai organisasi ekonomi rakyat, berwatak sosial, beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dan bersandikan asas kebersamaan dan kekeluargaan.¹

Undang-Undang No 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian yang merupakan penyempurnaan dari UU. No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, belum lama ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 28/PUU-XI/2013. Keputusan Mahkamah Konstitusi yang dalam putusan akhirnya menyatakan bahwa membatalkan UU No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian ini dikarenakan banyak pro kontra di masyarakat maupun pelaku koperasi yang kemudian melakukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk dilakukan Pengujian Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian.

Permohonan pengujian undang-undang tersebut diajukan oleh Gabungan Koperasi Jawa Timur yang secara resmi telah memasukkkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Februari 2013 berdasarkan akta penerimaan berkas permohonan No. 89/PAN.MK/2013 yang tercatat pada Nomor Perkara : 28/PUU-XI/2013, adapun pokok perkara dalam gugatan tersebut , yakni

¹ Dikutip Dalam *Proses Pembahasan Rancangan Undang-undang republik Indonesia Tentang Perkoperasian* UU No.25 Tahun 1992 H. 100

pengujian UU No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang mencakup Pasal 1 angka 1, Pasal 50 ayat (1), Pasal 55 ayat (1), Pasal 56 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 71, Pasal 72, Pasal 73, Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, Pasal 77, Pasal 80, Pasal 82, dan Pasal 83.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang dalam putusannya membatalkan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang perkoperasian secara keseluruhan, hal ini menimbulkan sebuah problem baru yakni memberlakukan kembali Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan saat ini. Sementara undang-undang yang baru sebagai pengganti Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 sesuai amanat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 belum muncul – muncul, sehingga ini menimbulkan polemik baru yang amat serius, untuk itu pemerintah harus cermat dalam *political will*nya untuk segera dan secepatnya mengagendakan pembuatan undang-undang perkoperasian yang baru dalam pengambilan kebijakannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka diperoleh permasalahan sebagai berikut:

- a. Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No. 28/PUU-XI/2013 membatalkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian?
- b. Bagaimana Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang pemberlakuan sementara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang melatarbelakangi Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No.28/PUU-XI/2013 membatalkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang pemberlakuan sementara Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992

1. Jenis Penelitian

Berpijak pada masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah politik hukum perkoperasian di Indonesia, maka penelitian ini mengimplikasikan metode yang berpijak pada analisis hukum. Deskripsi obyek masalah yang akan diteliti adalah politik hukum perkoperasian di Indonesia "studi yuridis putusan mahkamah konstitusi Nomor. 28/PUU-XI/2013 tetang di batalkannya Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Berdasarkan obyek tersebut, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian normatif ini pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu/masalah yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan undang-undang (*Statute approach*) dilakukan dengan menelaah Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang perkoperasian yang bersangkutan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

3. Jenis Bahan Hukum

Di dalam Penelitian Ini jenis bahan hukum yang digunakan adalah Bahan hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Hukum Tersier.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

5. Metode Analisa Bahan Hukum

Selanjutnya analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode interpretasi gramatikal dan interpretasi sistematis. Metode interpretasi gramatikal merupakan interpretasi berdasarkan bahasa atau kata-kata yang terdapat pada suatu perundang-undangan. Metode interpretasi sistematis adalah interpretasi dengan melihat kepada hubungan diantara aturan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang saling bergantung

1. Konsep Politik Hukum

Dalam membahas politik hukum maka yang dimaksud adalah keadaan yang berlaku pada waktu sekarang di Indonesia, sesuai dengan asas pertimbangan (hierarki) hukum itu sendiri, atau dengan terminologi Logeman, sebagai hukum yang berlaku disini dan kini. Adapun tafsiran klasik politik hukum, merupakan hukum yang dibuat atau ditetapkan di negara melalui lembaga negara atas pejabat

yang diberi wewenang untuk menentukannya.²

Politik hukum menganut prinsip *double movement*, yaitu selain sebagai kerangka pikir merumuskan kebijakan dalam bidang hukum (*legal policy*) oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang, ia juga dipakai untuk mengkritisi produk-produk hukum yang telah diundangkan berdasarkan *legal policy* diatas.³

Dalam konteks politik hukum jelas bahwa hukum adalah “alat” yang bekerja dalam “sistem hukum” tertentu untuk mencapai “tujuan” Negara atau “cita-cita” masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu, pembahasan mengenai politik hukum nasional harus didahului dengan penegasan tentang tujuan negara.⁴

2. Konsep Koperasi

Dilihat dari segi bahasa, secara umum koperasi berasal dari kata-kata latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang berarti bekerja. Dari dua kata ini, didalam bahasa inggris dikenal dengan istilah *Co* dan *Operation*, yang dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *Cooperatieve Vereniging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai satu tujuan tertentu. Kata *Cooperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai koperasi yang dibakukan menjadi satu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah KOPERASI, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya sukarela.⁵

Secara umum koperasi dipahami sebagai perkumpulan orang yang sukarela mempersatukan diri untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan

² Abdul Latif, hasbi Ali, Politik Hukum, (Jakarta, Sinar Grafika, 2010),H. 21

³ Imam Syaukani , A. Ahsin Thohari *Dasar-Dasar Politik Politik Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), H. 51

⁴ Moh. Mahfud MD *Membangun politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011),H.17

⁵ R.T Sutantya Rahardja Hadhikusuma, *Hukum Koperasi Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), H. 1

ekonomi mereka, melalui pembentukan sebuah perusahaan yang dikelola secara demokratis.⁶

3. Kajian tentang Mahkamah Konstitusi

Sebagai lembaga negara produk reformasi, Mahkamah Konstitusi menjadi tumpuan ekspektasi masyarakat yang menginginkan terjadinya perbaikan dalam bidang penegakan hukum. Sejauh ini Mahkamah Konstitusi telah merespons harapan publik tersebut melalui proses peradilan yang bersih dan putusan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan. Terkait dengan penegakan prinsip keadilan ini, Mahkamah Konstitusi mengedepankan keadilan substantif, yaitu keadilan yang lebih didasarkan pada kebenaran material daripada kebenaran formal-prosedural. Dengan kata lain, apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan jika secara material dan substantifnya juga melanggar keadilan. Sebaliknya apa yang secara formal-prosedural salah bisa saja dibenarkan jika secara material dan substantif sudah cukup adil. Mahkamah Konstitusi menekankan perlunya keadilan substantif untuk menghindari munculnya putusan yang mengabaikan rasa keadilan sebagaimana kerap ditemukan dalam putusan pengadilan pada masa lalu. Terobosan hukum tersebut perlu dilakukan untuk menggairahkan penegakan hukum dalam masyarakat.⁷

⁶ Revisond Baswir, *Koperasi Indonesia edisi pertama*, (Yogyakarta, BPFE-Yogyakarta, 1997) hal 2

⁷ Ni'matul Huda & R. Nazriyah, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-undangan* (Bandung: Nusa Dua, 2011) H.146.

1. Faktor-Faktor Penyebab Mahkamah Konstitusi Membatalkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Mengenai faktor-faktor penyebab Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 penulis akan mengkaitkan dengan argumentasi pemikiran Mahkamah Konstitusi yang akan diuraikan selanjutnya sehingga dapat mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28 PUU-XI 2013 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dan memberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Setidaknya ada 3 (tiga) faktor alasan Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012, diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor Filosofis

Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 dalam kenyataannya sudah tidak sesuai dengan hakikat susunan perekonomian Nasional. Seharusnya yang di jadikan landasan fundamental perkoperasian Nasional adalah konsep kolektivisme bukan konsep kapitalisme, yang memiliki ciri khas berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi sehingga koperasi mampu berperan sebagai sokoguru perekonomian Nasional.

2. Faktor Yuridis

Sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dengan jelas menyatakan perekonomian disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan yang berlandaskan gotong royong. Sehingga dalam kenyataannya Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2012 tidak

sesuai dengan cita dan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Faktor Sosiologis

Landasan Sosiologis setiap manusia selaku makhluk sosial pasti saling membutuhkan satu sama lain, yang kemudian bergaul dan berkumpul untuk memenuhi kebutuhannya, hal tersebut kemudian yang menyatukan dalam suatu wadah yakni koperasi. Skema Permodalan yang mengutamakan modal materiil dan finansial yang kemudian mengenyampingkan Modal sosial yang menjadi ciri utama fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal tersebut, yang kemudian menjadi sama dan tidak ada perbedaan dengan Perseroan Terbatas (PT).

2. Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 tentang pemberlakuan sementara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.

Berdasarkan esensi perubahan Undang-Undang No.25 Tahun 1992 menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 yang kemudian banyak hal yang belum diatur didalam Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 kemudian tertuang didalam Undang-Undang Perkoperasian yang baru. Sejatinya Undang-Undang No.17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian secara regulasi seharusnya mengkomodir kebutuhan pelaku koperasi nasional sesuai dengan perkembangan zaman di era global seperti sekarang ini. Kemudian dari beberapa hal yang baru yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dalam kenyataannya tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Pasal 33 ayat (1). Hal ini menjadi problem baru dalam dunia perkoperasian Nasional dimana Undang-Undang yang baru dibatalkan dan Undang-Undang yang lama sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman saat ini, sehingga harus segera dibentuk suatu regulasi baru dalam dunia perkoperasian agar supaya menjadi menjadi suatu payung hukum yang secara tegas mengakomodir kebutuhan koperasi Nasional. Dengan demikian negara dalam hal ini sudah memerankan perannya dengan baik.

Berdasarkan pentingnya pengganti Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 maka sejatinya yang menjadi landasan utama adalah penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi selaku lembaga yang berwenang untuk menafsirkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi sangat penting karena dapat digunakan sebagai acuan dalam pembentukan Undang-Undang yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Al-Hadist

Buku:

Amiruddin dan. Zainal Asikin *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Anoraga Panji dan Widiyanti Ninik, *Dinamika Koperasi*, Jakarta: Rineka Cipta 1999.

Asshiddiqie Jimly, *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2010.

Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Baswir Revrisond, *Koperasi Indonesia edisi pertama*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1997.

Bungin Burhan, *Metode Penelitian Kualitatif:Aktualisassi Metodologi Ke-Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2007.

Burhanuddin, *Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia*, Malang: UIN Maliki Press, 2013.

Fajar Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum, (Normatif & Empiris)*, Pustaka pelajar: Yogyakarta, 2010.

Farida Indrati Maria, *Ilmu PerUndang-Undangan 1, Jenis, Fungsi, dan materi Muatan*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1998.

Fatkurohman dkk, *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia* Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Fuady Munir, *Teori negara hukum modern*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.

Gultom Lodewijk, *Eksistensi Mahkamah Konstitusi dalam Struktur*

Ketatanegaraan di Indonesia, Bandung: CV. Utomo, 2007.

Hadhikusuma Rahardja Sutantya, *Hukum Koperasi Indonesia*, Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2000.

Harsoyo Y dkk, *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*, Yogyakarta: Pustaka

Widyatama, 2006.

Harsoyo Y. dkk, *Ideologi Koperasi Menatap Masa Depan*, Tangerang : Pustaka

Widyatama, 2006.

Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi (pokok-pokok pikiran mengenai*

manajemen dan Kewirausahaan Koperasi, Jakarta: Erlangga2010.

Huda Ni'matul, R. Nazriyah, *Teori dan Pengujian Peraturan PerUndang-*

Undangan, Bandung: Nusa media, 2011.

Latif Abdul, Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

Marjuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2007).

MD Mahfud Moh, *Membangun politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Jakarta:

Rajawali Pers, 2011.

MD Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers , 2010.

Muliadi Ahmad, *Politik Hukum*, Padang: akademika , 2013.

Nasution Muslimin, *Koperasi menjawab kondisi ekonomi nasional*, Jakarta

Selatan: PIP, 2008.

Pachta Andjar W, *Hukum Koperasi Indonesia* , Jakarta: kencana, 2007.

- Pachta Andjar W. Dkk, *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Palguna I Dewa Gede, *Pengaduan Konstitusional (constitutional complaint) upaya hukum terhadap pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Siahaan Maruarar, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Januari 2011).
- Sutiyoso Bambang, *Tata cara penyelesaian sengketa dilingkungan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Syahrizal Ahmad, *Peradilan Konstitusi suatu studi tentang adjudikasi konstitusional sebagai mekanisme penyelesaian sengketa normative*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006.
- Syamsuddin Aziz, *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Syaukani Imam, A. Ahsin Thohari *Dasar-Dasar Politik Politik Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Tamba Halomon Sitio Arifin, *Koperasi Teori dan Praktik*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2001.
- Thalib Abdul Rasyid, *Wewenang Mahakamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung : PY Citra Aditya Bakti, 2006.

Widiyanti Ninik, Y.W. Sunindhia, *Koperasi dan perekonomian Indonesia* Jakarta:

PT Rineka Cipta dan PT Bina Adiaksara, 2003.

Wirasasmita R.A. Rivai dan N. Kusno, Erna Herlinawati *Manajemen Koperasi*

Bandung: pionir Jaya, 1991.

Undang-Undang:

Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013

Risalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

Internet:

<http://bunga-legal.blogspot.com/2010/05/definisi-politik-hukum-dan-politik.html>,

diakses 14 Februari 2014